



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 183 TAHUN 2024

TENTANG

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu melaksanakan perencanaan penyusunan Peraturan Gubernur yang dituangkan dalam Program Pembentukan Peraturan Gubernur Tahun 2025 dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 72013);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


MARULLAH MATALI
NIP 196511271996031003

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 183 TAHUN 2024

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2025

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR TAHUN 2025

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
1	Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta	Inspektorat	V				<ol style="list-style-type: none">1. Penyatuan Pergub No 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan Kepgub Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko.2. Penguatan lini kedua dalam penerapan manajemen risiko untuk isu startegis.3. Penambahan Substansi materi contoh-contoh dalam melakukan proses identifikasi dan mitigasi risiko.	Triwulan IV
2	Standarisasi Bangunan Kantor Satpol PP Kota, Kabupaten dan Kecamatan	Satuan Polisi Pamong Praja	V				<ol style="list-style-type: none">1. Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak PNS, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satpol PP.2. Pergub Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung.3. Perlu ada standar konstruksi bangunan dan ruangan yang mendukung keselamatan, kemudahan, kenyamanan dan kelayakan khusus bagi Satpol PP tingkat Provinsi, Kota/Kabupaten dan Kecamatan	Triwulan II

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
3	Standar Operasional Prosedur Satpol PP Provinsi DKI Jakarta	Satuan Polisi Pamong Praja	V				1. PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. 2. Permendagri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satpol PP dan Kode Etik Pol PP.	Triwulan I
4	Peningkatan Pemahaman Peraturan Daerah di Lingkungan Sekolah	Satuan Polisi Pamong Praja	V				Pasal 59 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum	Triwulan I
5	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 138 Tahun 2015 tentang Honorarium Anggota TNI dan Polri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Satuan Polisi Pamong Praja			V		Penyesuaian standar honorarium bagi komando pengendali sesuai struktur TNI dan Polri	Triwulan I
6	Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah secara Yustisial dan Non Yustisial	Satuan Polisi Pamong Praja	V				1. PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. 2. Belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penegakan perda dan perkada secara Yustisial dan perubahan karakteristik Kota Jakarta ke depan.	Triwulan II
7	Pemberian Penghargaan, Tata Cara Upacara Pemakaman dan Serah Terima Jabatan di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta	Satuan Polisi Pamong Praja	V				Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan hak PNS, penyediaan sarana dan prasarana minimal, pembinaan teknis operasional dan penghargaan Satpol PP.	Triwulan IV

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
8	Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				V	Dasar pembentukan Pergub ini adalah Perda Nomor 2 Tahun 2011 sebagaimana telah dicabut dengan Perda Nomor 3 Tahun 2024.	Triwulan I
9	Pengelolaan Tenaga Profesional pada Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Badan Kepegawaian Daerah		V			Menindaklanjuti ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta terkait kewenangan khusus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengangkat Pegawai Profesional Non-Aparatur Sipil Negara pada Badan Layanan Umum Daerah.	Triwulan I
10	Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian	Badan Kepegawaian Daerah	V				Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan tertib administrasi proses pelaporan perkawinan, pemberian izin beristri lebih dari seorang, dan pemberian izin atau keterangan melakukan perceraian, Keputusan Gubernur Nomor 2799/2004 tentang Pendelegasian Wewenang Penolakan/ Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu diganti dan untuk selanjutnya diatur dengan peraturan gubernur.	Triwulan I
11	Pencabutan 3 (Tiga) Peraturan Gubernur di Bidang Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah				V	Pencabutan 3 (Tiga) Peraturan Gubernur di Bidang Kepegawaian, meliputi: 1) Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pengaturan Jam Kerja bagi Para Pegawai yang Bekerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Alasan:	Triwulan I

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							<p>Substansi Peraturan Gubernur merupakan substansi teknis yang dapat ditetapkan dalam Keputusan Gubernur, menyesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara.</p> <p>2) Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2017 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, Alasan: Substansi Peraturan Gubernur merupakan substansi teknis yang dapat ditetapkan dalam Keputusan Gubernur, dan menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, bahwa tim penilai kinerja dibentuk untuk memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi pegawai negeri sipil,</p> <p>3) Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2021 tentang Pengusulan Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Fungsional, Alasan: Substansi Peraturan Gubernur merupakan substansi teknis yang dapat ditetapkan dalam Keputusan Gubernur, dan menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang</p>	

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							Jabatan Fungsional dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3/M.SM.02.01/2024 hal Perpindahan Jabatan Fungsional dan Uji Kompetensi.	
12	Pendelegasian Kewenangan di Bidang Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah		V			Tindak lanjut atas evaluasi pelimpahan kewenangan dari Pejabat Pemerintahan kepada Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dalam rangka meningkatkan efektivitas layanan kepegawaian.	Triwulan II
13	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2023 tentang Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Ujian Dinas, dan Pencantuman Gelar	Badan Kepegawaian Daerah			V		Penyesuaian dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional.	Triwulan II
14	Mutasi Pegawai Negeri Sipil	Badan Kepegawaian Daerah			V		Penyesuaian ketentuan mengenai mutasi berdasarkan Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi.	Triwulan II
15	Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil	Badan Kepegawaian Daerah		V			Penyesuaian pengaturan terkait penilaian kinerja sebagai dasar pemberian TPP dan simplifikasi pengaturan pemberian TPP bagi guru.	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
16	Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Badan Kepegawaian Daerah		V			Penyesuaian beberapa Pasal dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang manajemen kinerja ASN dan perubahan ketentuan mengenai penilaian kinerja sebagai dasar pemberian TPP bagi PPPK.	Triwulan III
17	Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil	Badan Kepegawaian Daerah		V			Penyesuaian substansi Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Manajemen Talenta guna optimalisasi pencapaian tujuan organisasi melalui pemetaan talenta dengan memperhatikan kepemilikan potensi/kemampuan terpendam masing-masing talenta. Adapun penyesuaian sebagaimana dimaksud mengubah lebih dari 50% (lima puluh persen) muatan dalam Peraturan Gubernur a quo sehingga disusun Peraturan Gubernur pengganti.	Triwulan III
18	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah	V				Penyesuaian ketentuan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN bahwa digitalisasi ASN terintegrasi secara nasional dan pengaturan teknis mengenai digitalisasi manajemen ASN serta hasil penyusunan grand design sistem informasi kepegawaian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	Triwulan III
19	Pencabutan 12 (Dua Belas) Peraturan Gubernur di Bidang Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah				V	Pencabutan 12 (Dua Belas) Peraturan Gubernur di Bidang Kepegawaian, meliputi: 1) Keputusan Gubernur Nomor 82 Tahun 2003 tentang Persyaratan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							<p>2) Peraturan Gubernur Nomor 131 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 82 Tahun 2003 tentang Persyaratan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Alasan: Simplifikasi materi muatan yang selanjutnya akan diatur dalam Keputusan Gubernur tentang Manajemen Talenta,</p> <p>3) Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 tentang Pegawai Tidak Tetap;</p> <p>4) Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 tentang Pegawai Tidak Tetap;</p> <p>5) Peraturan Gubernur Nomor 198 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 tentang Pegawai Tidak Tetap;</p> <p>6) Peraturan Gubernur 152 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 tentang Pegawai Tidak Tetap;</p> <p>7) Peraturan Gubernur 79 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 tentang Pegawai Tidak Tetap;</p> <p>8) Peraturan Gubernur 201 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 tentang Pegawai Tidak Tetap;</p> <p>9) Peraturan Gubernur 59 Tahun 2018 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 tentang Pegawai Tidak Tetap;</p>	

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							<p>10) Peraturan Gubernur 85 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 tentang Pegawai Tidak Tetap; Alasan: Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terkait larangan mengangkat Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara;</p> <p>11) Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2014 tentang Perawatan Jenazah bagi Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan dan Keluarganya; Alasan: Substansi Peraturan Gubernur merupakan substansi teknis yang dapat ditetapkan dalam Keputusan Gubernur; dan</p> <p>12) Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil; Alasan: Penyesuaian dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan simplifikasi serta digitalisasi proses pemberian penghargaan masa kerja kepada PNS akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p>	
20	Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			V		Sudah tidak relevansi dengan situasi dan kondisi saat ini.	Triwulan I

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
21	Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2017 tentang Tugas Belajar	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		V			Menindaklanjuti SE Menpan RB Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi PNS Melalui Jalur Pendidikan, yang mana terdapat nomenklatur baru yaitu Tugas Belajar Mandiri dan karena telah dicabutnya Pergub Nomor 42 Tahun 2017.	Triwulan II
22	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Profesi Sumber Daya Manusia	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		V			Menyesuaikan dengan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan implemntasi pengembangan Jakarta Corporate University (JakCorpu)	Triwulan II
23	Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan Kegiatan Filantropi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		V			Bahwa Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan saat ini.	Triwulan II
24	Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2025-2029	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	V				<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Berkelanjutan; 2. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; dan 3. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Koordinasi, Penyusunan, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. 	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
25	Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	V				1. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional; dan 2. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah.	Triwulan III
26	Tata Cara Pengusulan dan Persetujuan Kegiatan Pekerjaan Tahun Jamak	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	V				Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.	Triwulan III
27	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	V				Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.	Triwulan III
28	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			V		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
29	Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	V				Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.	Triwulan III
30	Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	V				Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.	Triwulan III
31	Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		V			Menindaklanjuti Peraturan terbaru yaitu Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.	Triwulan III
32	Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RAK LLAJ) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	V				1. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							2. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	
33	Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			V		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.	Triwulan IV
34	Pedoman Implementasi Menyongsong Lima Abad Jakarta	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	V				Pedoman persiapan Acara HUT Jakarta ke 500 tahun.	Triwulan I
35	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			V		Guna memastikan proses implementasi Satu Data Indonesia tingkat Provinsi DKI Jakarta dan menindaklanjuti temuan BPKP RI Tahun 2023 bahwa Pemprov DKI Jakarta agar melaksanakan percepatan penyelesaian regulasi pendukung penyelenggara SDI, maka perlu penyesuaian materi dalam peraturan gubernur dimaksud.	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
36	Pedoman Investigasi Kebakaran	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan		V			Menyesuaikan dengan regulasi terbaru UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 114 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/ Kota.	Triwulan I
37	Stanarisasi Sarana dan Prasarana Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan		V			Penyesuaian terhadap Perrnendagri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadaman Kebakaran di daerah.	Triwulan IV
38	Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	V				Permenkominfo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren bidang Komunikasi dan Informatika	Triwulan III
39	Tata Cara Pengelolaan Domain dan subdomain di lingkungan Pemprov DKI Jakarta	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	V				Permenkominfo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren bidang Komunikasi dan Informatika	Triwulan IV
40	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			V		Permenkominfo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren bidang Komunikasi dan Informatika	Triwulan IV

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
41	Pedoman Penyelenggaraan Keamanan Siber dan Sandi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	V				Tindaklanjut rekomendasi evaluasi pelaksanaan persandiaan untuk pengamanan informasi Pemda	Triwulan III
42	Tata Kelola Sistem Close Circuit Television di Tempat Umum dan/atau pada Fasilitas Pelayanan Publik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	V				Landasan hukum pelaksanaan kegiatan Manage Service CCTV	Triwulan II
43	Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		V			Revisi Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 187 Tahun 2016 tentang Penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana.	Triwulan IV
44	Peran Serta Lembaga Usaha dalam Penyelenggaraan Penanggulangan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	V				Turunan Perka BNPB No.12 Tahun 2014 tentang Peran Serta Dunia Usaha dalam penyelenggaraan Bencana.	Triwulan IV
45	Perubahan atas Pergub 170 Tahun 2016 tentang Penggunaan Rambu Kebencanaan dan Sistem Penanggulangan Bencana pada Gedung	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			V		Menyesuaikan dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rambu dan Papan Informasi Bencana.	Triwulan IV
46	Regulasi tentang Pemulihan dan Peningkatan Fisik Pascabencana Provinsi DKI Jakarta	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	V				Belum ada regulasi terkait pelaksanaan pemulihan dan peningkatan fisik pascabencana di wilayah Provinsi DKI Jakarta	Triwulan IV

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
47	Klaster Logistik Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	V				Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2022 tentang Klaster Logistik Penanggulangan Bencana.	Triwulan IV
48	Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	V				Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana.	Triwulan IV
49	Standar Harga Satuan Upah Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			V		Keputusan Gubernur Nomor 151 Tahun 2022.	Triwulan IV
50	Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi		V			Sesuai Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.	Triwulan II
51	Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	V				Amanat dari Kemendari pada Surat Nomor 100.2.1.6/0353/OTDA Hal : Percepatan Pelaksanaan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia untuk membentuk produk hukum daerah yang mengatur mengenai Pelayanan Publik berbasis Hak Asasi Manusia.	Triwulan II

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
52	Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah beserta perubahannya	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi				V	Penyesuaian Nomenklatur Jabatan Pelaksana sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah.	Triwulan III
53	Roadmap Reformasi Birokrasi tahun 2025-2029	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	V				Masa berlaku Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024 sudah berakhir.	Triwulan IV
54	Reformasi Birokrasi	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	V				Penyesuaian terhadap Reformasi Birokrasi Nasional	Triwulan IV
55	Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi		V			Amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta	Triwulan IV
56	Sistem Kerja	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	V				Amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.	Triwulan IV

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
57	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga	Biro Pemerintahan			V		Untuk menjamin kepastian hukum serta menyesuaikan dengan kebutuhan hukum dan perkembangan di wilayah kota/kabupaten administrasi yang tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.	Triwulan II
58	Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah	Biro Hukum			V		Hasil evaluasi Biro Hukum terhadap Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah.	Triwulan III
59	Perjalanan Dinas	Biro Kerja Sama Daerah		V			Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri perlu disimplifikasi menjadi Peraturan Gubernur yang memuat ketentuan Perjalanan dinas di lingkup Pemprov DKI Jakarta dan Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta.	Triwulan I
60	Penderekan Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	V		0		a. berdasarkan amanat Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi Pasal 66 bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penderekan kendaraan bermotor diatur dengan Peraturan Gubernur;	Triwulan II

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							<p>b. adanya gugatan hukum yang pernah dilayangkan oleh pelanggar ke Dinas Perhubungan terkait pelaksanaan penindakan kendaraan yang parkir tidak ada tempatnya dengan penderekan karena belum adanya Peraturan Gubernur mengenai penderekan kendaraan bermotor;</p> <p>c. berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah serta berdasarkan hasil pendalaman dan kajian dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta bahwa penderekan kendaraan bermotor dan/atau penyimpanan kendaraan bermotor akibat pelanggaran parkir tidak pada tempatnya tidak dapat dikenakan retribusi melainkan dikenakan denda/sanksi administrative;</p> <p>d. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi menyebutkan penginapan dan penyimpanan kendaraan yang diderek karena melanggar rambu larangan dikenakan biaya Retribusi sebesar Rp500.000/hari/kendaraan;</p> <p>e. mengalir point c dan d, pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah untuk tarif retribusi atas penginapan dan penyimpanan kendaraan yang diderek karena melanggar rambu larangan parkir dihapus dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 karena tidak sesuai dengan definisi retribusi sehingga akan dialihkan ke Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (LLPAD).</p>	

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
61	Ruang Pengamanan Perkeretaapian	Dinas Perhubungan	V				<p>a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian, jalur kereta api terdiri dari Ruang Manfaat Jalur Kereta Api, Ruang Milik Jalur Kereta Api dan Ruang Pengawasan Jalur Kereta Api;</p> <p>b. bahwa dalam Ruang Manfaat jalur Kereta Api terdapat ruang bebas yang harus bebas dari segala rintangan dan benda penghalang di kiri, kanan, atas dan bawah jalan rel;</p> <p>c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 148 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi, bahwa pemanfaatan Ruang Milik Jalur Kereta Api tidak boleh membahayakan konstruksi jalan rel, fasilitas operasi kereta api, perjalanan kereta api dan keselamatan pengguna jasa kereta api;</p> <p>d. bahwa untuk mengamankan ruang milik jalur kereta api, maka perlu dilengkapi dengan ruang pengamanan perkeretaapian.</p>	Tiwulan I
62	Rencana Induk Perkeretaapian Perkotaan	Dinas Perhubungan	V				<p>1. sesuai dengan amanat UU 23/2007 tentang Perkeretaapian pada Pasal 11 : Rencana induk perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditetapkan oleh:</p> <p>a. Pemerintah untuk rencana induk perkeretaapian nasional;</p> <p>b. Pemerintah Provinsi untuk rencana induk perkeretaapian provinsi; dan</p> <p>c. pemerintah kabupaten/kota untuk rencana induk perkeretaapian kabupaten/kota.</p>	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							<p>2. sesuai amanat Perda 5.2014 tentang Transportasi yang terdapat pada:</p> <p>a. Pasal 148 ayat (3);</p> <p>b. Pasal 153 ayat (3);</p> <p>c. Pasal 157 ayat (4);</p> <p>d. Pasal 159 fan Pasal 164;</p> <p>e. Pasal 165 ayat (3);</p> <p>f. Pasal 169 ayat (2); dan</p> <p>g. Pasal 174</p> <p>3. sebagai turunan dari Rencana Induk Transportasi Jakarta 2025-2045</p> <p>4. Naskah Akademik dan Ranpergub RIPP telah tersedia dan akan segera diajukan setelah RITJ disetujui oleh DPRD menjadi Perda RITJ.</p>	
63	Pola Tata Kelola, Rencana Strategis dan Standar Pelayanan Minimal Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang	Dinas Perhubungan	V				Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pasal 38 ayat (2), Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (2) perlu meentapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola, Rencana Strategis dan Standar Pelayanan Minimal.	Triwulan III
64	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 256 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Dinas Perhubungan			V		<p>a. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi Pasal 244 ayat (4);</p> <p>b. Peraturan Gubernur Nomor 265 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Transportasi kota Provinsi DKI Jakarta;</p> <p>c. Proses seleksi DTKJ mengacu pada Pergub tersebut telah dilaksanakan sebanyak 3 periode. Dalam perjalanan proses seleksi dirasa perlu ada penyesuaian Pergub dikarenakan Pergub tersebut kurang memadai/kurang lengkap dalam hal proses seleksi sehingga pembaharuan dan penyempurnaan.</p>	Triwulan II

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
65	Penyelenggaraan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Dinas Perhubungan	V				<p>Dasar hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perpres 55/2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan; 2. Permenhub 15/2022 tentang Konversi Kendaraan Bermotor Selain Sepeda Motor dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai; 3. Permenhub 45/2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan menggunakan Penggerak Motor Listrik; 4. Permenhub 87/2020 tentang Pengujian Tipe Fisik Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai; 5. Permenhub 44/2020 sebagaimana telah diubah dengan Permenhub 86/2020 tentang Perubahan atas Permenhub 44/2020 tentang Pengujian Tipe Fisik Kendaraan Bermotor dengan Motor Penggerak Menggunakan Motor Listrik. 6. Permenhub 19/2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. 7. Perda 5/2014 Pasal 53 ayat 1 s.d. 4: <ol style="list-style-type: none"> (1) setiap kendaraan bermotor umum dan kendaraan dinas operasional pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib menggunakan bahan bakar ramah lingkungan. (2) bahan bakar ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bahan bakar gas, listrik, hybrid biofuel atau bahan bakar minyak berstandar paling sedikit euro-3. (3) terhadap penggunaan bahan bakar ramah lingkungan untuk kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan keringanan bea balik nama. 	Triwulan II

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							(4) ketentuan lebih lanjut mengenai besaran keringanan bea balik nama sebagaimana dimkasuda pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.	
66	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan	Dinas Perhubungan			V		Peralihan perizinan penyelenggaraan perparkiran berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Triwulan III
67	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 188 Tahun 2016 tentang Tempat Parkir Umum yang Dikelola Oleh Pemerintah	Dinas Perhubungan			V		Peraturan Gubernur Nomor 188 Tahun 2016 Pasal 7 bahwa Kepala Unit Pengelola Perparkiran melakukan evaluasi pelaksanaan penetapan tempat parkir umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lambat 2 (dua) tahun sekali.	Triwulan III
68	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai Unit Pengelola Perparkiran	Dinas Perhubungan			V		Berdasarkan amanat Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai Unit Pengelola Perparkiran Bab VI Evaluasi dan Pelaporan Pasal 8 ayat (1) Pemberian Remunerasi kepada pejabat pengelola dan pegawai unit pengelola dievaluasi setahun sekali atau sesuai dengan kebutuhan.	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
69	Pola Tata Kelola, Rencana Strategis dan Standar Pelayanan Minimal Unit Pengelola Angkutan Perairan	Dinas Perhubungan	V				Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pasal 38 ayat (2), Pasal 41 ayat (2), dan Pasal 43 ayat (2) perlu emnetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola, Rencana Strategis dan Standar Pelayanan Minimal.	Triwulan III
70	Tarif Layanan Angkutan Penumpang Umum Transjakarta	Dinas Perhubungan		V			<ol style="list-style-type: none"> 1. amanat Perda 5 Tahun 2014 tentang transportasi, Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 78 ayat (2) dimana perlu diselenggarakan sistem transportasi terpadu dan terintegrasi yang diatur dengan Peraturan Gubernur; 2. Gabungan dari 2 propempergub di tahun 2024 yang belum selesai yait Rapergub pelayanan gratis transjakarta (insentif layanan angkutan umum) dan rapergub tarif angkutan umum (satu moda); 3. tarif angkutan umum transjakarta belum ditetapkan dalam bentuk pergub,masih tertuang dalam Kepgub Nomor 1912 Tahun 20005 tentang penetapan tarif angkutan penumpang dengan mobil bus umum transjakarta-busway di DKI Jakarta; 4. Berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sistem Bus Rapit Transit, Pasal 10 ayat (6), tarif layanan sistem BRT dievaluasi dan disesuaikan setiap tahun sedangkan ketentuan mengenai tarif layanan angkutan transjakarta (satu moda) belum terdapat penyesuaian sejak tahun 2005; 5. tarif integrasi angkutan umum belum ditetapkan dalam bentuk pergub, masih tertuang dalam kepgub 733 tahun 2022 tentang besaran paket tarif layanan angkutan umum massal 	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
71	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2022 tentang Subsidi Layanan Angkutan Umum Transjakarta	Dinas Perhubungan			V		<ol style="list-style-type: none"> 1. amanat Perda 5 Tahun 2014 tentang Transportasi Pasal 136 dimana perlu ditetapkan tarif angkutan umum bersubsidi dengan formulasi penghitungannya; 2. beberapa pasal dalam Pergub 46 Tahun 2022 membutuhkan penyesuaian untuk menghasilkan subsidi yang efektif dan efisien; 3. temuan hasil pemeriksaan BPK yang berulang karena ketidaksesuaian dengan Pasal dalam Pergub 46 Tahun 2022; dan 4. tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. 	Triwulan III
72	Alat Mobilitas Personal	Dinas Perhubungan	V				<ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi teknologi transportasi yang berkembang dengan pesat dan adanya alat mobilitas personal yang sudah sangat massif penggunaannya di Provinsi DKI Jakarta sehingga diperlukan rapergub alat mobilitas personal sebagai tindak lanjut dan menjamin kepastian hukum serta memenuhi beberapa aspek keselamatan, keamanan dan ketertiban operasional alat mobilitas personal. 2. Rapergub sudah pernah diajukan dari tahun 2022 dan di tahun 2024 sudah diparaf serta sampai Wakil Gubernur namun dikembalikan oleh Pj Gubernur untuk diupdate nama penandatanganannya dan aturan hukum terkait lainnya. 3. turunan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik. 	Triwulan II

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
73	Tarif Layanan Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	V				<ol style="list-style-type: none"> 1. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah Pasal 83 ayat 6 bahwa Tarif Layanan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah, namun saat ini Tarif Layanan UPK PPUKMP Pulogadung masih menggunakan Keputusan Gubernur Nomor 92 Tahun 2003 tentang Ketentuan Sewa kontrak Penggunaan Lahan dan/atau Fasilitas Kerja di Lingkungan Perkampungan Industri Kecil (PIK) Pulogadung Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan 2. Besar tarif layanan sudah tidak sesuai dengan kondisi eksisting. 	Triwulan III
74	Tata Kelola, Rencana Strategis, dan Standar Pengendalian Minimal Badan Layanan Umum Daerah pada UPK PPUKMP Pulogadung	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	V				Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, bahwa salah satu persyaratan administratif Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah pola tata kelola, rencana strategis, dan standar pelayanan minimal.	Triwulan III
75	Penyesuaian tarif retribusi Atas Penggunaan Tempat Usaha Pada Lokasi Sementara Skala Mikro, Lokasi Sementara Skala Mikro Hewan Peliharaan, Lokasi Sementara Skala Mikro Tanaman Hias, Lokasi Promosi Usaha Mikro dan Kecil, dan Lokasi Binaan Usaha Mikro	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	V				<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan hasil audiensi dan menindaklanjuti aspirasi para pedagang / PKL atas tingginya kenaikan tarif retribusi pada Perda 1 Tahun 2024, maka perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi sebagaimana dimaksud; dan 2. Merujuk pada ketentuan pasal 94 Perda 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dapat dilakukan peninjauan tarif retribusi dan melakukan mekanisme penyesuaian tarif yang ditetapkan dengan Perkada (Peraturan Gubernur). 	Triwulan I

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
76	Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		V			<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah" dan Pasal 11 ayat (1) "tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah; - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Pasal 350 ayat (5) "Lepala Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan perizinan berusaha secara elektronik". - berdasarkan Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang nomor 2 Tahun 2024 terdapat kewenangan khusus terkait dengan subbidang data dan sistem informasi penanaman modal sehingga berimplikasi terhadap penyusunan peraturan gubernur tentang pelayanan perizinan secara elektronik maka dari itu pasca penetapan presiden terkait dengan perubahan ibukota maka diperlukan penyesuaian kekhususan terkait dengan pelayanan perizinan secara elektronik. - Peraturan Gubernur Nomor 205 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan secara Elektronik sudah tidak sesuai dan perlu diganti dalam rangka memastikan penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang andal dan memberikan kepastian hukum dengan didukung teknologi informasi yang terintegrasi dengan sistem elektronik yang dikembangkan pemerintah pusat dan perangkat daerah. 	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
77	Grand Desain Pengelolaan Ruang Laut Terpadu	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	V				Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta	Triwulan I
78	Penyelenggaraan Pematangan Hewan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian			V		Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya.	Triwulan II
79	Pola Tata Kelola, Rencana Strategis, dan Standar Pelayanan Minimal Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	V				Lanjutan dari proses Ranpergub SPM Pusyanke-swannak/Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD.	Triwulan I
80	Pengadaan Barang/Jasa Melalui Toko Daring E-Order	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	V				<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							4. Instruksi Gubernur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Transaksi E-purchasing Dengan Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil Melalui Sistem E-order.	
81	Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah		V			<p>Tindak lanjut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan memerlukan peraturan dalam pelaksanaan pembinaan kepada BUMD yang dilakukan oleh Kepala Daerah ataupun pejabat perangkat daerah yang dilimpahkan kewenangan dalam mengambil keputusan.</p> <p>Untuk itu diperlukan penyempurnaan terhadap beberapa Peraturan terkait pembinaan BUMD yang sudah ada selama ini, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Gubernur Nomor 96 Tahun 2004 tentang Penerapan Praktik GCG pada Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta. 2. Keputusan Gubernur Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pedoman Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta. 3. Keputusan Gubernur Nomor 39 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Kerja Sama Perusahaan Daerah. 4. Peraturan Gubernur Nomor 131 Tahun 2019 tentang Pembinaan Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta. 	Triwulan I

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							5. Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2019 tentang Pedoman Penugasan kepada Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta.	
82	Pencabutan atas Peraturan Gubernur tentang Penugasan-Penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	V				<p>Pencabutan atas Peraturan Gubernur terkait penugasan-penugasan pada BUMD yang telah selesai dilaksanakan dan telah habis masa berlaku penugasannya, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2021 tentang Penugasan kepada BUMD untuk melaksanakan kerjasama dengan BUMN dalam pengelolaan kawasan kota tua; 2. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2019 jo. Peraturan Gubernur Nomor 52 Th 2022 tentang Penugasan kepada PT Transjakarta untuk revitalisasi halte; 3. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2017 jo. Peraturan Gubernur Nomor 49 Th 2018 tentang Penugasan kepada Pasar Jaya untuk membangun Pasar di Kab. Adm. Kep. Seribu; 4. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penugasan kepada BUMD untuk penyediaan dan pembiayaan perolehan rumah bagi MBR; 5. Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2019 tentang Penugasan kepada Perumda Pembangunan Sarana Jaya dalam pengelolaan alat produksi PT Jaktour; 	Triwulan II

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							<p>6. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Lanjutan kepada PT Jakpro dalam penyelenggaraan fasilitas pengelolaan sampah dalam kota/ITF;</p> <p>7. Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2019 tentang Penugasan kepada PT Jakpro dalam penyelenggaraan fasilitas pengelolaan sampah antara di dalam kota; dan</p> <p>8. Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2019 tentang Penugasan kepada PT Jakpro dalam penyelenggaraan perusahaan pembiayaan infrastruktur.</p>	
83	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Pengawas, dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah			V		<p>Penyesuaian terhadap beberapa pasal atas masukan dan catatan atas hasil pemeriksaan BPK, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 23 dan Pasal 24 terkait pemberian fasilitas kendaraan kepada pengurus BUMD; 2. Pasal 19 terkait terkait Fasilitas Kesehatan bagi Pengurus BUMD; 3. Pasal 26 terkait fasilitas membership/corporate member bagi Pengurus BUMD; dan 4. Pasal 27 penyesuaian penghasilan atas perbaikan nilai pasar sesuai kondisi industry masing-masing BUMD. 	Triwulan III
84	Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya Untuk Melakukan Revitalisasi Tangki Septik Rumah Tangga	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	V				<p>Penjelasan Kepala Biro Hukum dalam Nota Dinas Kepala Biro Hukum kepada Kepala Biro PLH Nomor e-0511/HK.01.03 tanggal 22 November 2023 Hal Penjelasan Ranpergub tentang Revitalisasi Tangki Septik Rumah Tangga.</p>	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
85	Tarif Layanan Pengelolaan Air Limbah Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	V				Adanya penambahan layanan baru Paljaya yang tarifnya belum ditetapkan dalam Peraturan Gubernur antara lain layanan pengolahan lumpur tinja, layanan pengangkutan dan pengelolaan limbah B3, air daur ulang dan sesuai amanat Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta menjadi Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya.	Triwulan III
86	Penugasan Kepada Perumda Pasar Jaya dalam Pengelolaan Rusunawa Pasar Rumpit	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	V				Pengelolaan rumah susun sewa pasar rumput untuk melayani masyarakat dengan kriteria tertentu dengan tarif non komersial sesuai aspirasi Pemprov DKI Jakarta. sebagai dasar hukum pelaksanaan dan dukungan yang dibutuhkan Perumda Pasar Jaya, diperlukan penugasan dari Pemprov DKI Jakarta.	Triwulan II
87	Pedoman Penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah			V		Masukan dari Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta untuk memasukkan pengaturna terkait isi ruang lingkup minimal dalam pergub penugasan kepada Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta.	Triwulan III
88	Penugasan Kepada Badan Usaha Milik Daerah Terkait Untuk Penyediaan Dan Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	V				Tindak lanjut atas Keputusan Bersama Menteri Peumahan dan Kawasan Pemukiman , menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KTPS/Mn/2024 Nomor 3015/KTSP/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah.	Triwulan II

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
89	Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2019 tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) Dalam Penyelenggaraan Jaringan Utilitas	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah			V		Tindak Lanjut hasil Rapat Pimpinan tanggal 5 Desember 2024 dengan agenda pembahasan sarana jaringan utilitas terpadu	Triwulan I
90	Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah	Badan Pendapatan Daerah		V			Menyempurnakan Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah.	Triwulan II
91	Administrasi dan Tata Cara Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah		V			<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendelegasian Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 2. Menyempurnakan Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2011 tentang Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Peraturan Gubernur Nomor 211 Tahun 2012 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2013 tentang Pengenaan dan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Rumah Sakit Swasta. Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2013 tentang Pengenaan dan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Bidang Pendidikan Swasta, Peraturan Gubernur Nomor 168 Tahun 2015 tentang Pengurangan Pajak 	Triwulan I

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							Bumi dan Banyunan Perdesaan dan Perkotaan atas Cagar Budaya, Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah, Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pembebasan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepada Guru dan Tenaga Kependidikan, Dosen Dan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi, Veteran Republik Indonesia, Perintis Kemerdekaan, Penerima Gelar Pahlawan Nasional, Penerima Tanda Kehormatan, Mantan Presiden Dan Mantan Wakil Presiden, Mantan Gubernur Dan Mantan Wakil Gubernur, Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia Dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas Objek yang Digunakan untuk Melayani Kepentingan Umum di Bidang Keagamaan. Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2022 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas Objek yang Digunakan untuk Kegiatan Pertanian, Peternakan dan Perikanan.	
92	Pemindahbukuan Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah		V			Menyempurnakan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemindahbukuan Pajak Daerah	Triwulan I

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
93	Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah		V			<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendelegasian Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 2. Menyempurnakan Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah; dan 3. Menyempurnakan Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2020 tentang Penghapusbukuan Piutang Pajak Daerah yang Telah Kedaluwarsa dan Tidak Dapat Ditagih Lagi. 	Triwulan II
94	Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah (KSWPD)	Badan Pendapatan Daerah		V			Menyempurnakan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah dari Pemohon Perizinan dan Pemohon Pelayanan Perpajakan Daerah.	Triwulan I
95	Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)	Badan Pendapatan Daerah		V			Menyempurnakan Peraturan Gubernur Nomor 201 Tahun 2012 tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk Setiap Wajib Pajak.	Triwulan I
96	Tata Cara Penerbitan, Pembetulan, dan Pembatalan Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah	V				<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendelegasian Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan 2. Menyempurnakan Peraturan Gubernur Nomor 182 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pembetulan Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang. 	Triwulan II

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
97	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah		V			<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendelegasian Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan 2. Menyempurnakan Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah. 	Triwulan I
98	Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah	Badan Pendapatan Daerah		V			<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendelegasian Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan 2. Menyempurnakan Peraturan Gubernur Nomor 115 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah. 	Triwulan III
99	Pemutakhiran Data Wajib Pajak/Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan Objek Pajak	Badan Pendapatan Daerah	V				<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendelegasian Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan 2. Menyempurnakan Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2018 tentang Nomor Identitas Pajak Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2018. 	Triwulan III
100	Tata Cara Perhitungan Nilai Jual Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	Badan Pendapatan Daerah	V				Kebutuhan pengaturan karena ketentuan baru dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
101	Dasar Pengenaan Pajak Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat Tahun 2025	Badan Pendapatan Daerah	V				Pendelegasian Permendagri tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat setiap tahun berjalan	Triwulan III
102	Tata Cara Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Badan Pendapatan Daerah		V			<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendelegasian Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tara Cara Penilaian. 2. Menyempurnakan Peraturan Gubernur Nomor 208 Tahun 2012 tentang Penilaian dan Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 	Triwulan II
103	Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Badan Pendapatan Daerah		V			<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyesuaian klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak PBB-P2 saat ini. 2. Menyempurnakan Peraturan Gubernur Nomor 263 Tahun 2015 tentang Klasifikasi dan Penetapan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 	Triwulan I
104	Pedoman Pemberian Insentif Kepada Pejabat atau Pegawai yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Badan Pengelolaan Aset Daerah	V				Implementasi Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan Kepada Pejabat atau Pegawai yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah.	Triwulan I

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
105	Tata Cara Pemberian Rekomendasi atau Persetujuan Atas Permohonan Hak Atas Tanah di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan, Tanah Eks Desa, dan Tanah Eks Kota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Badan Pengelolaan Aset Daerah		V			<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencabut Peraturan Gubernur Nomor 239 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi atas Permohonan sesuatu Hak di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan, Tanah Eks Desa, dan Tanah Eks Kota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 217 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 239 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi atas Permohonan sesuatu Hak di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan, Tanah Eks Desa, dan Tanah Eks Kota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan 2. Penyesuaian kebutuhan Perangkat Daerah dalam rangka menindaklanjuti Bab XII pada Lampiran XXX Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah untuk Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pengelolaan Jakarta Asset Management Centre. 	Triwulan I
106	Pengelolaan Kendaraan Dinas	Badan Pengelolaan Aset Daerah		V			Mengakomodir kebutuhan atas penyempurnaan regulasi pelaksanaan pengelolaan kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, termasuk dalam penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan KBLBB sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.	Triwulan I

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
107	Pemberian Remunerasi untuk Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Unit Pengelolaan Jakarta Asset Management Centre	Badan Pengelolaan Aset Daerah	V				Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah untuk menyempurnakan persyaratan administrasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pengelola Manajemen Aset serta mendukung percepatan optimalisasi pendayagunaan dan pemanfaatan barang milik daerah.	Triwulan I
108	Mekanisme Penerimaan dan Pengeluaran Uang Jaminan Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan atas Penjualan Barang Milik Daerah berupa Gedung Bangunan	Badan Pengelolaan Aset Daerah	V				Menindaklanjuti temuan APIP pada Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 11/-1.922.3.Reg tanggal 26 Desember 2019 serta untuk menjamin tepat waktu pelaksanaan pekerjaan pembongkaran bangunan/gedung milik/dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang sudah terjual melalui pemindahtanganan secara lelang.	Triwulan III
109	Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2021 tentang Pemberian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas	Badan Pengelolaan Aset Daerah				V	Menindaklanjuti hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri Nomor: 188.34/5747/OTDA tanggal 16 Agustus 2022, hal fasilitasi Ranpergub tentang perubahan atas Pergub Nomor 75 Tahun 2021, di mana berdasarkan hasil fasilitasi Kemendagri ketentuan terkait pemberian BBM untuk kendaraan dinas cukup ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.	Triwulan II
110	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	V				Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
111	Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah		V			1. Pasal 185 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Pasal 3 huruf c dan huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.	Triwulan III
112	Kebijakan Akuntansi	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah			V		1. Pasal 185 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan 2. Pasal 3 huruf c dan huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.	Triwulan III
113	Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah secara Bersyarat atau Mutlak	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	V				1. Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang.	Triwulan I
114	Standar Harga Satuan APBD Tahun Anggaran 2026	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	V				1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.	Triwulan III
115	Analisis Standar Belanja	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah			V		1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
116	Perubahan atas Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah			V		<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan 4. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2020 tentang Pergeseran Anggaran Belanja Daerah. 	Triwulan II
117	Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	V				<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan 3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 	Triwulan III
118	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	V				<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan 3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
119	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Investasi pada Badan Usaha Milik Daerah dengan penambahan materi mengenai divestasi, pemberian pinjaman daerah, dan penerapan Penyertaan Modal Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah			V		Mengganti Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Investasi pada Badan Usaha Milik Daerah dengan penambahan materi mengenai divestasi, pemberian pinjaman daerah, dan penerapan Penyertaan Modal Daerah yang lebih detail	Triwulan III
120	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2013 tentang Penatausahaan Penarikan Dana Hibah Bagi Pembangunan Perkeretaapian Perkotaan Mass Rapid Transit	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah		V			Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2013 tentang Penatausahaan Penarikan Dana Hibah Bagi Pembangunan Perkeretaapian Perkotaan Mass Rapid Transit memiliki keterbatasan dalam mengatur seluruh aspek pendanaan proyek MRT Jakarta. Pergub ini hanya mengatur mekanisme penarikan dana hibah, sementara mekanisme pendanaan lain seperti pinjaman pemerintah pusat belum diatur secara spesifik.	Triwulan III
121	Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah		V			Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai badan layanan umum daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.	Triwulan III
122	Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah dengan Pihak Lain	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	V				Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
123	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Aspek Keuangan Badan Layanan Umum Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah			V		Terdapat perubahan kode akun dalam laporan keuangan sebagai dasar formula perhitungan kinerja keuangan BLUD.	Triwulan III
124	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 124 Tahun 2020 tentang Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah			V		Sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, bahwa pendapatan BLUD dari jasa layanan termasuk objek retribusi.	Triwulan III
125	Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah		V			Tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.	Triwulan III
126	Belanja Tidak Terduga	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	V				Tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.	Triwulan III
127	Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Hibah dari Pihak Lain Kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	V				<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. 	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
128	Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Melalui Electronic Budgeting dan Peraturan Gubernur Nomor 28 tahun 2019 tentang Pedoman Operasional Implementasi E-Budgeting Tahap Penganggaran	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah				V	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 4. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2020 tentang Pergeseran Anggaran Belanja Daerah; 5. Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Electronic Budgeting; 6. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pedoman Operasional Implementasi E-Budgeting Tahap Penganggaran. 	Triwulan III
129	Pelaksanaan penguatan tata kelola penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi	V				Surat Edaran Bersama 4 Menteri tentang penguatan tata kelola penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.	Triwulan I
130	Penyesuaian Retribusi Pelayanan Kebersihan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pengelola Sampah Terpadu	Dinas Lingkungan Hidup			V		<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 94 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lambat 3 tahun sekali dan penyesuaiannya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. 2. Bahwa dibutuhkan penyesuaian terhadap retribusi pelayanan kebersihan pada jasa pengolahan sampah pada: 	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							<p>a. Fasilitas Refused Derived Fuel (RDF) di Rorotan dan TPST Bantargebang, dimana saat ini nilai retribusi tersebut belum diatur.</p> <p>b. Penyesuaian harga jual material daur ulang dengan mempertimbangkan harga pasar saat ini.</p>	
131	Pedoman Pemantauan Kualitas Udara Menggunakan Sensor	Dinas Lingkungan Hidup	V				Perlu pedoman bagi masyarakat dalam melakukan pemasangan sensor kualitas udara di Jakarta	Triwulan III
132	Rencana Induk Pengelolaan Limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup	V				<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah tersusunnya Kajian dokumen Perencanaan (roadmap) Pengelolaan Limbah 83 yang bersumber dari fasyankes, Usaha Skala kecil (USK) dan rumah tangga di tahun 2022. 2. Telah tersusunnya kajian Rencana induk pengelolaan limbah 83 ditahun 2023. 3. Diperlukan penetapan terkait dengan rencana induk yang dimaksud agar dapat dipedomani OPD, instansi dan stakeholder terkait. 4. Pembahasan ranpergub belum masuk ke dalam fasilitasi Kemendagri di tahun 2024 sehingga diperlukan pengusulan kembali ditahun 2025. 	Triwulan II
133	Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Medis dari Fasyankes	Dinas Lingkungan Hidup	V				1. Dalam rangka menjawab hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Jakarta atas kinerja pengelolaan limbah 83medis Tahun Anggaran 2020 dan Semester I Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan.	Triwulan II

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							<p>2. Adanya kebutuhan pedoman bagi fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) di wilayah DKI Jakarta dimana belum adanya aturan daerah mengenai pengelolaan limbah medis yang berasal dari fasyankes.</p> <p>3. Melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf C Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Limbah Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis wilayah.</p>	
134	Pola Tata Kelola, Rencana Strategis, dan Standar Pelayanan Minimal Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah	Dinas Lingkungan Hidup	V				<p>1. Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah (LLHD) telah memenuhi persyaratan untuk menerapkan BLUD yang meliputi persyaratan substantif, teknis, dan administrative (sesuai dengan hasil penilaian Tim Penilai);</p> <p>2. Berdasarkan Pasal 38 ayat (2), Pasal 41 ayat(2), dan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, ketentuan mengenai pola tata kelola, rencana strategis, dan standar pelayanan minimal pada BLUD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.</p>	Triwulan III
135	Pelayanan Kebersihan Untuk Rumah Tinggal dan Kegiatan Wajib Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	V				Telah tersusunnya dokumen kajian skema Pembiayaan Pengelolaan Sampah dan diperlukan Regulasi Turunan dari Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berupa Rencana Pembentukan Peraturan Gubernur yang digunakan sebagai regulasi terhadap implementasi lapangan atas pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.	Triwulan II

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
136	Pedoman Kerja Sama Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pengelola Sampah Terpadu	Dinas Lingkungan Hidup	V				Berdasarkan Pasal 90 dan Pasal 91 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dinyatakan bahwa BLUD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan. Kerja sama dengan pihak lain dapat dilakukan dengan kerja sama operasional dan pemanfaatan barang milik daerah, dan tata cara kerja sama dengan pihak lain diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.	Triwulan II
137	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2021 tentang Nilai Perolehan Air Tanah sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah	Dinas Sumber Daya Air			V		<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 68 ayat (1); b. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 15 ayat (3); c. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah, Pasal 12; d. Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2021 tentang Nilai Perolehan Air Tanah sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah, perlu diubah karena tidak dapat diimplementasikan secara maksimal. 	Triwulan III
138	Zona Bebas Air Tanah (Penggantian Atas Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2021 tentang Zona Bebas Air Tanah)	Dinas Sumber Daya Air		V			<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pasal 9 ayat (1); 	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							<p>b. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 259.K/GL/01/MEM.G/2022 tentang Standar Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah, Lampiran II Nomor 11;</p> <p>c. Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2021 tentang Zona Bebas Air Tanah, perlu diubah karena kewenangan pengawasan izin pengusahaan air tanah dilakukan oleh Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.</p>	
139	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Utilitas	Dinas Bina Marga			V		Rapat Pembahasan Hasil Evaluasi Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Utilitas yang diselenggarakan Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2024	Triwulan I
140	Fasilitasi Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha dan Non Berusaha	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan		V			<p>Terdapat perubahan NSPK terkait penyelenggaraan perizinan berusaha dan non berusaha, mengacu pada beberapa peraturan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. 	Triwulan II

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Usaha Berbasis Risiko. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 7. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang. 8. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 15 tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang 9. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang. 10. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal. 11. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Pemanfaatan Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi DKI Jakarta.	
141	Penyelenggaraan Kawasan dengan Panduan Rancang Kawasan	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan		V			Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi DKI Jakarta, maka Peraturan Gubernur No. 147 Tahun 2017 tentang Pedoman Panduan Rancang Kota, Peraturan Gubernur No. 67 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kawasan Berorientasi Transit dan Peraturan Gubernur No. 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur No. 67 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kawasan Berorientasi Transit perlu disempurnakan.	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
142	Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Jakarta	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan		V			Terdapat penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta, Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 - 2044, sehingga perlu penyesuaian terhadap muatan yang ada di dalam Rencana Detail Tata Ruang Provinsi Jakarta.	Triwulan IV
143	Pemenuhan Kewajiban Pembiayaan dan Pembangunan Rumah Susun Murah/ Sederhana oleh Pemegang Izin Pemanfaatan Ruang	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan		V			Revisi atas Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemenuhan Kewajiban Pembiayaan dan Pembangunan Rumah Susun Murah/Sederhana melalui Konversi oleh Para Pemegang Izin Pemanfaatan Ruang sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2020.	Triwulan II
144	Tata Cara Pemenuhan Kewajiban dari Para Pemegang SIPPT/IPPT/IPPR	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan		V			<p>a. Dalam rangka percepatan penyelesaian kewajiban yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan sebelumnya, dibutuhkan adanya pengaturan terkait penyederhanaan dan kemudahan perizinan pemenuhan kewajiban SIPPT/IPPT/IPPR.</p> <p>b. Diperlukan revisi atas Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemenuhan Kewajiban dari Pemegang Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang.</p>	Triwulan III
145	Insentif dan Disinsentif	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan	V				<p>a. Dalam rangka menindaklanjuti amanah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang 	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							<p>Provinsi Daerah Khusus Jakarta;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;</p> <p>4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang;</p> <p>5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;</p> <p>6. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.</p> <p>b. Sebagai perangkat pengendalian pemanfaatan ruang yang diberikan kepada pelaku kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung terwujudnya tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang</p>	
146	Transfer Delevopment Right (Pengalihan Hak Membangun)	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan	V				<p>Dalam rangka menindaklanjuti amanat di penjelasan Pasal 170 dan Pasal 172 PP No. 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang serta Pasal 77 dan Pasal 83 Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang dimana TDR merupakan salah satu instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTR.</p>	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
147	Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan		V			<p>a. Perubahan regulasi akibat berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang berdampak pada Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Pemanfaatan Ruang, dan Jasa Konstruksi.</p> <p>b. Pergub No. 14 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi yang sudah tidak relevan dengan perkembangan kota DKI Jakarta sebagai kota global sehingga diperlukan penyusunan kembali aturan mengenai Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi</p>	Triwulan III
148	Penyelenggaraan Reklame	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan		V			<p>a. Perubahan regulasi akibat berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang berdampak pada Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Pemanfaatan Ruang, dan Jasa Konstruksi.</p> <p>b. Upaya mewujudkan DKI Jakarta sebagai kota global, diharapkan mampu menjadi kota yang berperan penting dalam pengintegrasian ekonomi transnasional (menjadi primary node dalam jaringan ekonomi dunia) yang mampu menarik modal, barang, sumber daya manusia, gagasan, informasi secara global sekaligus membuka peluang dan memberi ruang untuk pelaku usaha.</p>	Triwulan II

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
149	Pedoman Standarisasi Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Negara Jabatan Camat dan Lurah	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan		V			<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pedoman Standarisasi Kantor dan Rumah Dinas Jabatan Camat dan Lurah sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah. 2. Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perlu dilakukan standarisasi terhadap ketentuan dalam pengaturan Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Negara Jabatan Camat dan Lurah. 	Triwulan III
150	Efisiensi Energi pada Sektor Bangunan Gedung	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan	V				Dalam rangka menindaklanjuti Aksi Prioritas 1 Climate Action Implementation (CAI) "Mengambil Tindakan Atas Peningkatan, Implementasi, Evaluasi dan Arah Strategis Kebijakan Bangunan Gedung Hijau DKI Jakarta" , diperlukan penyusunan regulasi yang memuat strategi pencapaian target pengurangan emisi GRK 30% pada tahun 2030 pada sektor bangunan gedung sebagaimana target yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah yang Berketahanan Iklim.	Triwulan II
151	Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Penataan Ruang, Bangunan Gedung, dan Jasa Konstruksi	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan		V			Dalam rangka menjamin kepastian hukum dan ketertiban diperlukan tata cara dan mekanisme dalam pengenaan sanksi administratif dalam bidang penataan ruang, Bangunan Gedung dan jasa Konstruksi.	Triwulan II

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
152	Tata Cara Pengesahan Pertelaan dan Akta Pemisahan Rumah Susun	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan	V				Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik perlu pengaturan mengenai tata cara dan mekanisme Pemisahan Rumah Susun.	Triwulan II
153	Ranpergub tentang Mekanisme Penghunian Rumah Susun Umum Sewa	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		V			Penyesuaian dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun	Triwulan I
154	Ranpergub tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Tahun 2025-2045	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	V				<ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah daerah mempunyai tugas untuk menyusun RP3KP. - Sampai saat ini Provinsi DKI Jakarta belum memiliki dokumen panduan yang mengatur terkait pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang ditetapkan sebagai produk hukum. - Progres sampai dengan Oktober 2024 : pembahasan substansi pergub dengan Biro PLH. - target penyelesaian draft pergub adalah pada akhir Oktober 2024 	Triwulan I
155	Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		V			<p>Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan.</p> <p>Pembentukan Peraturan Gubernur diharapkan dapat menjadi payung hukum kegiatan pengelolaan pengalihan Unit Sarusun Hunian Terjangkau Milik untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.</p>	Triwulan II

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
156	Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	V				Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Gubernur 71 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Perumahan, dengan pertimbangan hasil Kajian Penyusunan Tarif Layanan Dana Perumahan yang disusun oleh Universitas Pelita Harapan direkomendasikan skema bagi hasil yang tertuang dalam Pergub 80/2019 pasal 3 poin (a) perlu untuk diubah. Berdasarkan analisis struktur biaya dan analisis struktur pendapatan disimpulkan bahwa UPDP sebagai BLUD dapat mencukupi biaya operasionalnya dengan cara mengoptimisasi penempatan dana FPPR. Selain itu, sebagai strategi untuk menarik minat Bank Pelaksana untuk dapat berpartisipasi dalam Program Hunian Terjangkau Milik.	Triwulan III
157	Pengembangan Dana Perumahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	V				Skema investasi yang bertujuan untuk optimalisasi Dana FPPR sehingga dapat menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk mendapatkan hunian yang layak dana terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).	Triwulan IV
158	Penerimaan Peserta Didik Baru	Dinas Pendidikan		V			<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyesuaian kebijakan penerimaan peserta didik baru pada tingkat pusat pasca transformasi kementerian yang membidangi urusan Pendidikan. 2. Penyesuaian kebijakan terkait sistem Zonasi dan penyelenggaraan Ujian Nasional. 	Triwulan I

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
159	Pendidik Kontrak Kerja Individu pada Satuan Pendidikan Negeri	Dinas Pendidikan		V			<ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan pegawai Non-Aparatur Sipil Negara harus segera diselesaikan berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. 2. Peralihan Tenaga Kependidikan Kontrak Kerja Individu menjadi Penyedia Jasa Lainnya Perorangan. 3. Penyesuaian dan peralihan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dari Dinas Pendidikan kepada Suku Dinas Pendidikan. 4. Mencabut beberapa peraturan gubernur, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Gubernur Nomor 235 Tahun 2015 tentang Honorarium Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah Negeri; b. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 235 Tahun 2015 tentang Honorarium Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil Pada Sekolah Negeri; dan c. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2019 tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Negeri. 	Triwulan I

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
160	Petunjuk Teknis Pembiayaan Pendidikan untuk Sekolah Swasta di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Dinas Pendidikan	V				<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. 2. Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Pembiayaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. 	Triwulan I
161	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan bagi Peserta Didik di Satuan Pendidikan dan Lingkungan Satuan Pendidikan	Dinas Pendidikan			V		<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan. 2. Penambahan materi pendukung kebijakan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dalam pengelolaan sekolah terintegrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 	Triwulan II

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
162	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Nonformal	Dinas Pendidikan			V		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyesuaian nomenklatur Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Negeri menjadi Sanggar Kegiatan Belajar sesuai Keputusan Gubernur Nomor 592 Tahun 2023 tentang Perubahan Nama 39 (Tiga Puluh Sembilan) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Negeri menjadi 39 (Tiga Puluh Sembilan) Sanggar Kegiatan Belajar di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 2. Penyesuaian materi muatan terkait pendirian dan perubahan untuk Satuan Pendidikan Negeri. 	Triwulan II
163	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 264 Tahun 2014 tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Dinas Pendidikan			V		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyesuaian terhadap Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 264 Tahun 2014 tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan terkait rincian tugas dan tanggung jawab penyediaan prasarana dan sarana pendidikan dengan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. 2. Penyesuaian materi muatan untuk mengatur penyediaan, pemeliharaan, dan perawatan prasarana dan sarana pendidikan beserta tugas dan tanggung jawab tiap perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah. 	Triwulan III
164	Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Satuan Pendidikan	Dinas Pendidikan			V		Menyesuaikan dengan perubahan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional Dana Alokasi Khusus Nonfisik Kebijakan Belanja Barang dan Jasa pada Satuan Pendidikan terkait pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan satuan Pendidikan.	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
165	Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 231 Tahun 2015 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan Kota/Kabupaten Administrasi	Dinas Kesehatan				V	Berdasarkan masukan dari Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi, Dinas Kesehatan akan mengalihkan tugas Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan Komisi Penanggulangan AIDS Kota/Kabupaten Administrasi ke Dinas Kesehatan mengingat secara kelembagaan Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional telah berakhir masa tugasnya berdasarkan Pasal 17A ayat (1) dan Pasal 17B Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.	Triwulan I
166	Integrasi Layanan Kesehatan Berbasis Kompetensi	Dinas Kesehatan	V				Pasal 820 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, terkait klasifikasi rumah sakit berdasarkan kemampuan layanan.	Triwulan I
167	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan	Dinas Kesehatan			V		Kebutuhan perangkat daerah dalam meningkatkan ketetapan sasaran pemberian bantuan perlindungan sosial dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	Triwulan II
168	Remunerasi Unit Pelaksana Teknis dan Unit Organisasi Bersifat Khusus yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan		V			Penggabungan terhadap revisi: 1. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2021 tentang Remunerasi Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah khususnya terkait penambahan nomenklatur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.	Triwulan II

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							2. Peraturan Gubernur Nomor 221 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Penghasilan bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Unit Kerja Perangkat Daerah Bidang Kesehatan, terkait pemberian insentif bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.	
169	Peninjauan Tarif Retribusi Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan		V			<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 94 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2. Peninjauan terhadap beberapa tarif retribusi yang sebelumnya sudah diatur dalam peraturan gubernur, diantaranya terkait Tarif Pelayanan Rumah Sakit Daerah, Tarif Layanan Pusat Krisis dan Kegawatdaruratan Kesehatan Daerah, Tarif Layanan Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai, dan Tarif Layanan Laboratorium Kesehatan Daerah. 	Triwulan III
170	Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Sertifikat Laik Higiene Sanitasi bagi Restoran/Rumah Makan/Jasa Boga	Dinas Kesehatan				V	<p>Materi muatan pokok dalam Rancangan Peraturan Gubernur dimaksud telah diatur dalam peraturan perundang-undangan lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tata cara (administrasi, teknis, uji laboratorium, dan penilaian mandiri) penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi sama dengan materi muatan yang diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan. 	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							<p>2. Pelatihan kepada masyarakat yang akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan dilaksanakan oleh Pusat Pelatihan Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.</p> <p>3. Kewenangan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p>	
171	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan bagi Mantan Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur beserta Istri/Suami	Dinas Kesehatan			V		Pelayanan kesehatan bagi mantan Gubernur dan Wakil Gubernur sudah dilaksanakan tetapi belum memiliki petunjuk pelaksanaan terhadap layanan tersebut, dan layanan yang diberikan merupakan manfaat yang sama dalam program Jaminan Kesehatan Nasional sehingga perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan Gubernur dimaksud	Triwulan III
172	Penyelenggaraan Bantuan Sosial	Dinas Sosial		V			<p>Penggabungan materi muatan mengenai bantuan sosial, sebagai berikut:</p> <p>1. Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan Bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu.</p> <p>2. Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan Bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu.</p>	Triwulan I

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							<p>3. Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan Bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu.</p> <p>4. Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2021 tentang Bantuan Sosial Biaya Pendidikan.</p> <p>5. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Sosial Dalam Rangka Pelindungan Sosial.</p>	
173	Pedoman Pengangkatan Anak	Dinas Sosial		V			Menyesuaikan materi muatan mengenai bimbingan, pengawasan, dan pelaporan pelaksanaan pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2018 tentang Bimbingan, Pengawasan, dan Pelaporan Pelaksanaan Pengangkatan Anak.	Triwulan III
174	Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Dinas Sosial	V				Pasal 7 ayat (5), Pasal 8 ayat (2), Pasal 14, Pasal 20 ayat (7), Pasal 22, Pasal 31 ayat (4), Pasal 32 ayat (2), Pasal 33 ayat (4), Pasal 38, Pasal 42, Pasal 44 ayat (3), Pasal 53, Pasal 61, Pasal 65, Pasal 69, Pasal 79, Pasal 82, Pasal 93, Pasal 100, Pasal 101, Pasal 104, Pasal 107, Pasal 113 ayat (3), Pasal 116, Pasal 125, Pasal 126 ayat (3), Pasal 128, Pasal 129, dan Pasal 132 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.	Triwulan IV

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
175	Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Dinas Sosial		V			Pengelolaan data berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	Triwulan IV
176	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Karang Taruna	Dinas Sosial			V		<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Sosial telah membuat kajian sederhana tentang pentingnya Karang Taruna tingkat kecamatan menerima bantuan pendanaan berupa biaya operasional tiap bulannya. 2. Penyesuaian materi muatan terkait pendanaan Karang Taruna tingkat kecamatan diberikan melalui mekanisme hibah. 	Triwulan IV
177	Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pengelolaan Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki	Dinas Kebudayaan	V				Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah	Triwulan II
178	Peninjauan Tarif Retribusi Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki	Dinas Kebudayaan	V				<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Permendagri 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. 2. Pasal 94 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 	Triwulan II
179	Pelestarian Cagar Budaya	Dinas Kebudayaan	V				<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya 	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya.	
180	Rencana Aksi Daerah Kepemudaan Tahun 2023-2026	Dinas Pemuda dan Olahraga			V		Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.	Triwulan II
181	Desain Olahraga Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Dinas Pemuda dan Olahraga	V				1. Pasal 13 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. 2. Pasal 19 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Desain Olahraga Daerah	Triwulan II
182	Tata Cara Pelaksanaan Pembangunan Prasarana dan Penyediaan Sarana Olahraga Aspirasi Masyarakat	Dinas Pemuda dan Olahraga	V				Dasar hukum pelaksanaan pembangunan prasarana dan pengadaan sarana olahraga yang berasal dari aspirasi masyarakat	Triwulan III
183	Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 176 Tahun 2010 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender dan Peraturan Gubernur Nomor 170 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 176 Tahun 2010 tentang Kelompok Kerja	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk				V	Berdasarkan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	Triwulan I

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
184	Tata Cara Pelayanan Penanganan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	V				Pasal 12 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	Triwulan III
185	Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	V				Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas	Triwulan III
186	Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 (lima) Pilar	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk		V			Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan	Triwulan IV
187	Ruang Publik Terpadu Ramah Anak	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk		V			Penggabungan terhadap Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Ruang Publik Terpadu Ramah Anak, dan Peraturan Gubernur Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Ruang dalam Rangka Kegiatan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak	Triwulan IV

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
188	Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk			V		Rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terkait hasil evaluasi penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik integratif di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan uji petik pada Kota Administrasi Jakarta Timur	Triwulan IV
189	Pos Pelayanan Terpadu	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	V				Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, Pos Pelayanan Terpadu yang sebelumnya berupa unit kegiatan bersama masyarakat yang mendekatkan pelayanan kesehatan ke masyarakat bertransformasi menjadi pelayanan dalam 6 (enam) bidang Standar Pelayanan Minimal.	Triwulan IV
190	Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	V				Simplifikasi beberapa peraturan gubernur, meliputi: 1. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Umum; 2. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Layanan Perpustakaan Digital; 3. Peraturan Gubernur Nomor 180 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Khusus 4. Peraturan Gubernur Nomor 238 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah/Madrasah.	Triwulan I
191	Prasarana dan Sarana Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		V			Pasal 101 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kearsipan Daerah	Triwulan IV

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
192	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengorganisasian Kearsipan Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			V		Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 90 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kearsipan Daerah.	Triwulan IV
193	Prosedur Pemberian Persetujuan Pembangunan Rumah Ibadah	Biro Pendidikan dan Mental Spiritual	V				Pasal 3 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.	Triwulan IV
194	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2016 tentang Lembaga Koordinasi Dakwah Islam	Biro Pendidikan dan Mental Spiritual			V		Penyesuaian masa tugas dalam 1 (satu) periode kepengurusan dan menghapus Pasal 28 terkait honorarium pengurus.	Triwulan IV

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MARUNLAH MATALI
NIP. 196511271996031003